

**Analisis Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
(SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Magetan Tahun 2014**

**Andri Widiyanto
20120520170**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kebijakan di sektor ketenagakerjaan. Salah satu kebijakan tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dengan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pejabat di Dinsosnaker Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih baik, cepat, mudah, aman, dan lebih efisien serta program SISKOTKLN digunakan untuk memberantas dan memerangi percaloan TKI. Tujuan dari penelitian analisis implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan tahun 2014 ini untuk mengetahui implementasi/penerapan program SISKOTKLN di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan tahun 2014. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode dokumentasi; dan unit analisis dalam penelitian ini dengan para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan.

Implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan pada tahun 2014 dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baik, mudah, murah, cepat, aman dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Adapun dalam bentuk pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia adalah pendataan calon TKI, pendidikan dan pelatihan kerja TKI, perlindungan dan penempatan TKI serta pelayanan penerbitan kartu identitas bagi TKI. Secara keseluruhan pelayanan terhadap TKI tersebut sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya beberapa faktor-faktor yang mendukung implementasi program SISKOTKLN di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan, yaitu faktor komunikasi yang sudah baik antar stakeholder, adanya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, anggaran dan sumber informasi yang jelas, adanya sarana dan prasana pendukung serta terdapat faktor struktur birokrasi yang jelas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini pengertian TKI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program SISKOTKLN, TKI.

PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi permasalahan dibidang ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia adalah tidak sebandingnya keberadaan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Indonesia. Faktor keberadaan lapangan pekerjaan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan bagian dari aktivitas yang sangat penting agar dapat memperoleh sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu sejak tahun 2012 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan perbaikan dan pembenahan di sektor pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui salah satu program berbasis teknologi informasi yang terpadu pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pembangunan di sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Sebelum berlakukannya program pelayanan pendataan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berbasis sistem, dalam pelaksanaannya programnya masih berjalan secara manual atau melakukan pendataan dalam bentuk administrasi tertulis dan bentuk pembukuan dari data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke Luar Negeri sehingga proses pelayanan secara manual masih cenderung mempersulit koordinasi pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendaftaran bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) memenuhi syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Adanya program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) ini sangat membantu dan mempermudah pekerjaan dalam pelayanan pendataan TKI yang

dilakukan oleh pejabat di Instansi Pemerintah Daerah dan dapat memerangi calo TKI serta program ini juga membantu masyarakat yang akan bekerja menjadi TKI untuk menerima pelayanan secara baik, cepat, murah, mudah dan efisien sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis teknologi informasi. Seperti yang dikemukakan menurut Benyamin Suprayogo (Kepala Puslitfo BNP2TKI) mengatakan, “Sistem online untuk pelayanan TKI sangat membantu para pejabat Dinsosnakertrans di Kabupaten/Kota dalam memerangi para calo TKI dan memberantas praktek percaloan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”¹, sehingga dengan adanya pelayanan berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pembangunan Nasional di sektor ketenagakerjaan melalui pembinaan, pelatihan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih baik dan lebih optimal.

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sangat membantu stakeholder dan Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan, salah satunya para pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota dalam memerangi para calo TKI, mengurangi terjadinya manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta tujuan utamanya adalah untuk memastikan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut sudah terdata dan direkomendasikan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait Analisis Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan pada tahun 2014 dikarenakan salah satu upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pemberantasan percaloan dan memerangi adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal serta program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sangat membantu para pejabat di Dinsosnaker Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.

¹ www.bursakerjaabdy.com/14-disnaker-kabupatenkota-ikuti-sosialisasi-dan-pelatihan-sistem-online. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 18.45 WIB.

Pelaksanaannya program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Instansi Pemerintahan Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan berpedoman pelaksanaan sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan Tahun 2015 dapat mewujudkan programnya sesuai dengan tujuannya dan sasaran yang telah ditetapkan dalam memberikan peningkatan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih baik

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014 ?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengamati sejauh mana implementasi/pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan Tahun 2015 dengan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dengan para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan dan metode dokumentasi diperoleh melalui data-data pendukung pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) seperti buku pedoman pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dan Laporan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbasis sistem informasi (SISKOTKLN). Unit analisis dalam penelitian ini dengan para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, menganalisis data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang telah diteliti.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014.

Dalam Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan Tahun 2014 terdapat beberapa pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut:

a) Pelayanan pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Berdasarkan hasil penelitian pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Magetan pada tahun 2014 terdapat data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdaftar bekerja di 5 (lima) Negara di kawasan Asia, yaitu Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Brunei Darussalam. Berikut ini jumlah data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) berdasarkan SISKOTKLN di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Kabupaten Magetan Tahun 2014

| No | Negara | Tahun 2014 | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
| 1 | Singapura | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 86 |
| 2 | Taiwan | 78 | 66 | 91 | 56 | 56 | 42 | 36 | 60 | 70 | 79 | 50 | 52 | 736 |
| 3 | Hongkong | 27 | 39 | 32 | 16 | 30 | 16 | 22 | 19 | 36 | 31 | 14 | 13 | 295 |
| 4 | Malaysia | 2 | 9 | 10 | 90 | 43 | 10 | 15 | 9 | 3 | 9 | 4 | 15 | 219 |
| 5 | Brunei D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 120 | 124 | 140 | 170 | 136 | 76 | 76 | 94 | 121 | 123 | 73 | 85 | 1338 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

Secara umum data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) berdasarkan SSKO-TKLN di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan tahun 2014 menunjukkan bahwa para pendaftar yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Magetan bekerja di Negara tujuan kawasan Asia, yaitu Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Brunei Darussalam. Secara keseluruhan pelayanan pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang berdasarkan dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SSKOTKLN) sudah berjalan dengan lebih baik dan optimal terlihat data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pada tahun 2014 yang tercatat dengan cepat, mudah dan tepat.

b) Pelayanan pendidikan dan pelatihan kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan yang bekerjasama dengan PT Karya Sukses Mandiri selaku yang ditunjuk sebagai Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di Kabupaten Magetan melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Selain itu bentuk dari tata cara pendidikan dan pelatihan kerja bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kabupaten Magetan yang lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

| No | Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) |
|----|--|
| 1 | Membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI/TKI. |
| 2 | Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di Luar Negeri. |
| 3 | Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa sesuai Negara tujuan. |
| 4 | Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI. |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

Secara umum pendidikan dan pelatihan kerja bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilaksanakan diharapkan dapat berjalan dengan baik, mudah dan lebih optimal serta dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian bagi para TKI sehingga mampu bersaing untuk bekerja di Luar Negeri.

c) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dipergunakan sebagai pedoman oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan untuk menjalankan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satu prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Calon TKI yang sudah terdaftar sebagai pencari kerja ke Luar Negeri dapat memperoleh kartu AK I (Kartu Kuning).
- 2) Calon TKI harus mengikuti penyuluhan, pendataan, pendaftaran dan seleksi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) setempat dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.
- 3) Calon TKI dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus melengkapi dokumen pokok sebagai persyaratan.

- 4) Calon TKI menandatangani perjanjian penempatan bersama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.
- 5) Calon TKI diberangkatkan ke penampungan untuk mengikuti tes kesehatan, tes psikologi, pelatihan dan pengurusan dokumen-dokumen lain yakni Paspor, Visa kerja dan Perjanjian kerja.
- 6) Calon TKI diikutkan dalam PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan diikutkan dalam program asuransi serta penandatanganan Perjanjian Kerja.
- 7) Calon TKI diberi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- 8) TKI diberangkatkan ke Negara tujuan dengan visa kerja.

Sebagaimana ketentuan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan dapat menjadi tahapan-tahapan dalam menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia menuju Negara tujuannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja di Luar Negeri. Sejauh ini penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah berjalan dengan baik dengan terlihatnya dari tersedianya database penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang dapat diakses dimana saja secara online dan real time serta pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang lebih baik, cepat, mudah, aman dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur pelayanan yang berbasis sistem teknologi informasi.

d) Pelayanan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Adapun perlindungan yang diberikan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Negara tujuan.

- 2) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan Peraturan Perundang-undangan di Negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditempatkan.
- 3) Memberikan bimbingan dan advokasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
- 4) Memberikan Asuransi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam bentuk santunan berupa uang dan jaminan fasilitas perawatan kesehatan sebagai akibat resiko yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Adapun beberapa asuransi yang harus di ikuti oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu asuransi pra penempatan berlaku selama sebelum berangkat (dinyatakan lulus) sampai dengan awal penempatan, asuransi penempatan terdapat 2 yaitu asuransi dari Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri dan Asuransi di negara tujuan bekerja yang di uruskan oleh majikan.
- 5) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang mengalami permasalahan.
- 6) Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang dapat berjalan baik melalui beberapa bentuk perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia seperti, memberikan bantuan dan bimbingan hukum, memberikan asuransi kerja, memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa dan melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga melalui bentuk-bentuk perlindungan diatas dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

e) Pelayanan penerbitan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dalam proses pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang terjadi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan terdapat beberapa tata cara dalam memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dapat dilihat dari tabel dibawah ini tata cara memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai berikut :

Tabel 3.7

Tata Cara Memperoleh

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

| No | Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) |
|----|--|
| 1 | Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) harus melampirkan : a) Paspor, Visa kerja, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian kerja dan Sertifikat Kesehatan; b) Surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); c) Bukti pembayaran DP3TKI (Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI). |
| 2 | Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh Perusahaan untuk kepentingan sendiri harus melampirkan : a) Paspor, Visa kerja, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian kerja; b) Surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); c) Bukti pembayaran DP3TKI (Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI). |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

Dari tabel tata cara memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) diatas menunjukkan bahwa terbagi menjadi dua kategori dalam tata cara memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang sesuai asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditempatkan atau yang berasal dari kategori Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempat melalui Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan kategori Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang

ditempatkan melalui perusahaan untuk kepentingan sendiri sehingga bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah memegang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) berarti telah memenuhi persyaratan bekerja di Luar Negeri.

Pelayanan penerbitan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah dapat berjalan dengan baik hal tersebut didukung dengan pemenuhan persyaratan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang lengkap sesuai persedur ketentuannya sehingga dalam pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) berjalan dengan baik, cepat, lancar dan mudah di seluruh Indonesia.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan tahun 2014.

a) Komunikasi

Adanya faktor komunikasi yang dilakukan dengan para stakeholder yang terlibat dalam terlaksananya program dengan baik. Hal ini terlihat dari komunikasi yang dilakukan Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengawasan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah terlihat berjalan dengan baik serta kerjasama dengan PT Karya Sukses Mandiri sebagai Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di Kabupaten Magetan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah berjalan dengan baik.

b) Sumber Daya

Berikut ini sumber-sumber daya yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi implementor atau pelaksana kebijakan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri

(SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, antara lain yaitu :

| No | Nama Pegawai | Jabatan |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Drs. Suhud, MM. | Kepala Bidang Tenaga Kerja |
| 2 | Endang Chrisnarti, S.Sos. | Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3 | Agung Budiarto, S.Sos. | Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja |
| 4 | Guntoro | Staf Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja |
| 5 | Himawan Kristianto, S.IP. | Staf Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan

Adanya 5 Pejabat PNS di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan diatas yang berkompeten sesuai bidang ketenagakerjaan sebagai pelaksana kebijakan pada pelaksanaan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berbasis teknologi informasi melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

- 2) Tersedianya sumber daya finansial atau anggaran yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan yang dimana anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta tersedianya sumber informasi terkait pedoman pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang bersumber dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

c) Disposisi

Faktor disposisi implementor/pelaksana, dalam hal ini faktor disposisi para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas urusan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbasis teknologi informasi melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sudah sangat berjalan dengan baik dikarenakan para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan yang khususnya dibidang tenaga kerja dan seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja dituntut untuk berkerja memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai aplikasi di program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dengan baik.

Para pejabat juga dituntut memiliki komitmen untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang telah ditugaskan kepadanya serta diharapkan adanya sikap kesiapan dari pejabat pelaksana yang disertai kejujuran untuk dapat mematuhi segala bentuk aturan dan prosedur sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan.

d) Struktur Birokrasi

Adanya struktur birokrasi yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan program tersebut dapat menjadikan implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat mencegah adanya kendala yang mungkin terjadi pada pelaksanaan program. Demikian juga adanya dukungan dari para birokrasi, terutama para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sehingga faktor struktur birokrasi dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan program tersebut.

e) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sudah diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.8
Sarana dan Prasarana Pendukung SISKOTKLN
Di Dinas Kabupaten/Kota

| No | Sarana dan Prasarana Pendukung SISKOTKLN Di Dinas Kabupaten/Kota |
|----|---|
| 1 | Ruang Komputer atau Personal Computer (PC) |
| 2 | Jaringan Internet minimal 512 Kbps |
| 3 | Printer Laserjet |
| 4 | Webcam minimal 2 MP |
| 5 | Finger Print |
| 6 | Scanner |
| 7 | Dinas Kabupaten/Kota harus memiliki User-ID SISKOTKLN |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan

Adanya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dapat terciptanya perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih baik, cepat, mudah, aman dan efisien dalam pelayanan yang berbasis teknologi informasi melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan tahun 2014 sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari beberapa bentuk pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berbasis teknologi informasi diantaranya pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), pendidikan dan pelatihan kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan dan

penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta pelayanan penerbitan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Secara keseluruhan beberapa pelayanan tersebut yang terdapat dalam program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan program SISKOTKLN yang berbasis teknologi informasi, dalam pelaksanaan sangat membantu dan mempermudah para pejabat di Dinsosnakertrans Kabupaten Magetan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik, seperti pelayanan pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang lebih mudah dan cepat; pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih optimal; pelayanan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kedepan dapat berjalan dengan baik serta pelayanan penerbitan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat terlaksana dengan mudah dan cepat.

SARAN

Saran ini diharapkan menjadi masukan kepada pelaksana implementasi kebijakan agar dapat menjadi evaluasi kerja pelaksana kebijakan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih baik, cepat, mudah, aman dan efisien. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui adanya beberapa saran untuk memberikan masukan sebagai berikut: 1) Perlu adanya perbaikan dan peningkatan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Kabupaten Magetan. 2) Pemerintah Kabupaten Magetan diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berbasis teknologi informasi melalui program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) guna dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mendukung terlaksananya program tersebut. 3) Mengenai sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan diharapkan perlu ditingkatkan untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Agus P., Erwan dan Dyah Ratih S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Koenjoroningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bappeda. 2015. *Data Dasar Kabupaten Magetan (Basic Data of Magetan Regency)*. Magetan.

Sumber lain

Tesis :

Misroji. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MAP), Universitas Esa Unggul Jakarta.

Jurnal :

Nico D. Mohamad. 2013. *Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berasal dari Jawa Timur dalam Otonomi Daerah (Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya. Malang.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan :

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tentang Lampiran Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER-41/KA/XI/2008.

Internet:

www.siskotkln.bnp2tki.go.id/. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 10.17 WIB.

www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 10.17 WIB.

www.bursakerjaabdya.com/14-disnaker-kabupatenkota-ikuti-sosialisasi-dan-pelatihan-sistem-online. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 18.45 WIB.

www.magetankab.go.id. Diakses pada tanggal 7 November 2015 pukul 19.05 WIB.